

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan konsep budaya politik dan teori legitimasi masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan budaya politik dan legitimasi masyarakat OKU Selatan peneliti menggunakan konsep budaya politik dari *Gabriel Almond* dan *Sidney Verba* (budaya politik parokial, budaya politik subyek dan budaya politik partisipan) dan teori legitimasi politik dari *Max Weber* (otoritas tradisional, otoritas karismatik dan otoritas legal – rasional).

Landasan pemikiran yang bersumber dari beberapa tokoh diatas kemudian diolah oleh peneliti untuk mempermudah menganalisis dua permasalahan yang akan dijawab yaitu : *Pertama*, permasalahan mengenai bagaimana budaya politik terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan, dan yang *kedua*, permasalahan mengenai bagaimana legitimasi politik terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

A. Budaya Politik Masyarakat OKU Selatan

Negara yang demokratis dengan identitas budaya dalam politik sangat berpengaruh dan biasanya melarut dalam berbagai lembaga politik yang ada. Kondisi ini mendorong gesekan penguatan budaya yang berorientasi politik. Selama pemerintahan nasional dan daerah menjalankan pelayanannya dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara adil maka gerakan etnis (suku) tidak terlalu signifikan. Namun manakala ada perlakuan yang tidak adil, hak-hak sosial dan politik terabaikan serta kepentingan kelompok tidak dapat diakomodasi, maka akan adanya ketimpangan sosial. Suku beserta budayanya dapat diwujudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan politik yang berbeda dengan ruh budaya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dalam *The Civic Culture*¹ dinyatakan bahwa budaya politik merupakan konsep teoritis penting yang menjembatani antara sifat-sifat mikro dan subyektif dari sistem politik, dan unsur-unsur makro serta institusionalnya. Budaya dimiliki secara bersama oleh individu-individu, budaya dan struktur juga sama-sama saling tergantung, karena keduanya harus cocok satu sama lain. Karena ketika kultur bersesuaian dengan struktur, maka keduanya dianggap sebangun dan kongruen. Namun jika tidak bersesuaian, kultur akan dianggap menunjukkan “*keterasingan politik*”, Menurut *Gabriel Almond* dan *Sidney Verba*², budaya yang terasing karena bersesuaian dengan struktur yang terbilang sudah demokratis. Budaya yang terasing

¹ Kenneth Newton dan Jan. W Van Deth, (2016). *Perbandingan Sistem Politik : Teori dan Fakta*, (Bandung : Nusa Media), h.,227.

²*Ibid*, h.,228.

itu cenderung menghasilkan tuntutan perubahan dan tingkat ketidakstabilan politik. Dalam kasus-kasus ekstrem, budaya dapat juga menghasilkan tekanan massa untuk perubahan politik.

Dalam menampilkan budaya politik masyarakat Kabupaten OKU Selatan, hal ini menyentuh pada aspek apa yang membentuk budaya politik masyarakat Kabupaten OKU Selatan itu sendiri. Dalam konsep budaya politik *Gabriel Almond* dan *Sidney Verba*³, bentuk budaya politik masyarakat secara umum yaitu budaya politik partisipan, budaya politik subyek dan budaya politik parokial sebagai berikut :

1. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan merupakan budaya politik dimana rakyat mengerti peranannya sebagai warga negara dan memperhatikan perkembangan politik. Mereka bangga akan sistem politik negara mereka dan bersedia untuk berdiskusi tentang politik. Mereka percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi politik dan mengklaim akan membentuk sebuah kelompok untuk memprotes ketidakadilan. Budaya politik partisipan merupakan landasan yang ideal untuk mempertahankan demokrasi.

Budaya politik masyarakat Kabupaten OKU Selatan dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam budaya masyarakat tersebut. Dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat khususnya budaya masyarakat OKU Selatan dipenuhi oleh

³*Op.cit*, Micheal G Roskin, h.,134-135.

interaksi antar orientasi dan antar nilai. Interaksi ini menimbulkan kontak-kontak antara budaya politik suatu kelompok, lebih tepatnya disebut subbudaya politik dengan budaya politik kelompok lainnya yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Tingkat keserasian antara struktur politik (kepemimpinan politik di OKU Selatan) dengan aspek budaya masyarakat OKU Selatan inilah yang justru merupakan masalah fundamental, baik itu secara horizontal maupun vertikal.

Secara horizontal budaya politik masyarakat OKU Selatan ini saling bersaing untuk memperebutkan posisi dan pengaruh yang dominan pada sistem politik, sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi faktor penentu didalam proses politik. Sementara itu, secara vertikal terdapat perbedaan antara pemimpin politik dan budaya politik masyarakat OKU Selatan. Hal ini jelas merefleksikan orientasi politik dan posisi masing-masing pihak dalam sistem politik.

Dalam hal ini, pemangku adat suku ranau Kabupaten OKU Selatan menjelaskan bahwa kepemimpinan politik di OKU Selatan dalam kekuasaannya memang diterapkan secara aturan yang diwujudkan dalam kode hukum formal sehingga menarik simpati masyarakat khususnya Suku Ranau yang ada di OKU Selatan.

Berikut adalah informasi yang peneliti dapatkan pada saat melaksanakan wawancara dengan pemangku adat suku ranau :

“Tahun 2019-2020 adalah tahun peralihan, nekham kelima pemangku adat (Suku Daya, Suku Ranau, Suku Semende, Suku Kisam dan Suku Haji) adu cawa khik sepakat nyukhuh Popo Ali Martopo nyalon luwot delom pemilihan Kepala Daerah kanah, khik nekham aga mileh ia dengan senang ati. Di dipa, pemekhintah mendukung program-program api se tiusulko pemangku adat khik pemangku adat juga mendukung program-program pemekhintah. Wat janji politik Popo Ali Martopo se maseh makung khadu, mungkin jak cutek ni anggaran. Sekatini program se adu tibangun pemekhintah khik pemangku adat harus tikhaduko antak khua periode”

“Tahun 2019 – 2020 adalah tahun peralihan, kami kelima pemangku adat (Suku Daya, Suku Ranau, Suku Semende, Suku Kisam dan Suku Haji) sudah berkomunikasi dan sepakat menyarankan Popo Ali Martopo maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang, dan kami akan memilih dia dengan senang hati. Dimana pemerintah mendukung program-program yang diusulkan oleh pemangku adat dan pemangku adat juga mendukung program-program pemerintah. Lagipula janji politik Popo Ali Martopo masih ada yang belum terlaksana, mungkin karena keterbatasan anggaran. Maka dari itu program yang telah dibangun pemerintah dan pemangku adat harus diselesaikan dalam dua periode”⁴

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dari responden diatas, memberikan informasi bahwa memang benar masyarakat OKU Selatan khususnya pemangku adat mengerti dengan perannya sebagai masyarakat serta memperhatikan kinerja dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat dibenarkan dan disetujui secara bersama-sama. Dimana budaya politik

⁴ Wawancara dengan Ahmad Buchori (*Sultan Takdir Sah I*), Pemangku Adat Ranau, Kabupaten OKU Selatan. Wawancara Tanggal 21 September 2019.

partisipan masyarakat OKU Selatan menimbulkan pula tindakan kolektif dari pemangku adat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Dalam budaya politik partisipan, masyarakat memiliki peran mengawasi terhadap kebijakan dan aturan yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan. Kebijakan yang telah dibuat dengan mendirikan sebuah lembaga Dewan Pembina Adat yang berfungsi untuk membina, menaungi dan melestarikan adat dan budaya yang ada di Kabupaten OKU Selatan itu sendiri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 15 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, pada Bab VIII (Lembaga Adat) pasal 41, pasal 42 dan pasal 43⁵. Melalui dewan pembina adat, pemerintah OKU Selatan juga telah membuat kebijakan dengan memberikan bantuan dana operasional pertriwulan bagi adat dalam pemeliharaan rumah adat dan barang-barang yang dianggap bersejarah bagi adat.

Selain itu juga, pemerintah OKU Selatan telah memberikan dana operasional bagi adat untuk melestarikan seni adat, perlengkapan adat seperti pakaian adat. Hal demikian juga berdampak pada pilihan politik masyarakat Kabupaten OKU Selatan, khususnya Suku Ranau yang dalam hal ini

⁵<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/33834/perda-kab-ogan-komering-ulu-selatan-no-15-tahun-2013>. Diakses pada Tanggal 18 November 2019.

diungkapkan oleh salah satu tokoh adat sekaligus tokoh agama suku ranau sebagai berikut :

“Delom pemilehan nekham berpartisipasi khik mendukung sepa gawoh se jadi pemimpin, se lebih penting ia amanah dan adil, disamaratako pembangunan antak pedesaan. Soal pilehan politik masyarakat takhno adu bebas, nyak sebagai Tokoh Agama khik Tokoh Adat angka ngejuk tian motivasi khik ngejukko wawasan, nyin tian pandai sepa se aga tian pileh jak hati nurani masing-masing”

“Dalam pemilihan kita berpartisipasi dan mendukung siapapun yang menjadi pemimpin, yang terpenting amanah dan adil, disamaratakan pembangunan hingga kepedesaan. Soal pilihan politik masyarakat sekarang sudah bebas, saya sebagai tokoh agama sekaligus tokoh adat hanya memberikan motivasi dan memberikan wawasan, agar masyarakat tahu siapa yang akan mereka pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing”.⁶

Berdasarkan penjelasan responden diatas, didapatkan bahwa masyarakat OKU Selatan khususnya dari Suku Ranau ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten OKU Selatan. Dapat dikatakan juga bahwa tokoh agama hanya memberikan motivasi dan wawasan bagi masyarakat agar masyarakat mampu memilih figur pemimpin sesuai apa yang mereka kehendaki tanpa adanya paksaan.

Lebih dari itu, kebijakan ataupun program yang telah dilaksanakan oleh kepemimpinan politik di OKU Selatan juga diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak pula terhadap adat. Berikut

⁶ Wawancara dengan Hasim Ihsan, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Suku Ranau, Kabupaten OKU Selatan. Wawancara pada tanggal 21 September 2019.

ini salah satu informasi dari responden terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh kepemimpinan politik di OKU Selatan :

“Pembangunan di OKU Selatan temon nihan helau, contohni di Kecamatan Banding Agung dapok kepercayaan jak pemerintah pusat, dengan tibangunni hotel bintang telu, wat muneh area wisata kuliner khas ranau, khik muneh pembangunan rumah sakit daerah khedik pontondi, kik pembangunan babatan ni maseh lapah, pembangunan seunyinnikan berkaitan lawan pariwisata dan pariwisata no berkaitan muneh lawan adat”

“Pembangunan di OKU Selatan ini baik sekali, contohnya di Kecamatan Banding Agung dapat kepercayaan dari pemerintah pusat dengan dibangunnya hotel bintang tiga, ada pula area tempat wisata kuliner khas ranau, dan pula dibangun juga rumah sakit daerah dekat dermaga. Kalau pembangunan jalan masih dilaksanakan, seluruh pembangunan ini berkaitan dengan pariwisata dan pariwisata ini juga berkaitan dengan adat”.⁷

Berdasarkan informasi dari responden diatas, menunjukkan bahwa aspek adat sangat diperdulikan dalam pembangunan yang ada di OKU Selatan. Potensi pariwisata juga dimanfaatkan oleh kepemimpinan politik OKU Selatan untuk menarik simpati wisatawan lokal, wisatawan luar daerah, wisatawan luar kota hingga wisatawan mancan negara. Dengan dibangunnya kebijakan diatas, juga memberikan masyarakat membuka lapangan pekerjaan dengan menghasilkan kerajinan dan berdagang, sektor ekonomi masyarakat sekitar pariwisata yang ada juga dapat meningkat.

⁷*Op.cit*, Ahmad Buchori.

Dengan demikian, dalam budaya politik masyarakat OKU Selatan terhadap kepemimpinan politik berlangsung relatif lebih mudah dan proses penyerasian budaya dan kepemimpinan politik dalam sistem politik terbilang berbanding lurus. Tentu saja hal ini berdampak pada proses pembentukan budaya politik masyarakat OKU Selatan yang dapat memelihara stabilitas sistem politik.

2. Budaya Politik Subyek

Budaya politik subyek merupakan budaya politik yang bersifat kurang demokratis dibandingkan dengan budaya politik partisipan, dimana masyarakat memahami peranannya sebagai warga negara dan memperhatikan politik, namun bertindak lebih pasif. Mereka mengikuti pemberitaan politik, tetapi tidak bangga dengan sistem politik dan hanya memiliki sedikit komitmen emosi terhadap politik. Mereka merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan politik dan menganggap kemampuan mempengaruhi politik hanya sebatas berdialog dengan pejabat setempat. Demokrasi kesulitan untuk berkembang dalam budaya politik seperti ini, yakni masyarakatnya terbiasa menganggap dirinya sebagai subyek yang patuh ketimbang sebagai partisipan.

Budaya politik masyarakat OKU Selatan menunjukkan sikap dukungan terhadap sistem politik dan kepemimpinan politik yang ada. Sikap ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam budaya masyarakat tersebut baik sebagai individu maupun kelompok. Tatanan dan proses politik

yang ada di Kabupaten OKU Selatan memberikan makna karena sejalan dengan budaya politik masyarakat yang ada di Kabupaten OKU Selatan itu sendiri. Karena nilai dan budaya (tradisi) merupakan unsur yang sentral untuk membentuk, orientasi, sikap politik dan budaya politik masyarakat OKU Selatan tersebut.

Lebih dari itu aspek kultur (adat istiadat) sangat kuat basis lokalnya yang berpusat pada ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin tradisional maupun karismatik. Dimana dalam hal ini budaya (adat) yang ada di OKU Selatan, tokoh masyarakat maupun tokoh adat secara tradisi maupun yang memiliki karismatik dapat mempengaruhi proses pembentukan budaya politik masyarakat OKU Selatan. Berikut adalah informasi yang peneliti dapatkan pada saat melaksanakan wawancara dengan salah satu masyarakat OKU Selatan :

“Delom membentuk perilaku pemilih, pemangku adat wat 50% untuk mempengaruhi. Pemangku adat kana du otomatis tirekomendasiko uleh pihak kandidat maupun jak timsesni. Artini pemangku adat juga dapat mempengaruhi masyarakatni. Nyak diwik mileh pemimpin no karena wat khasa kekerabatan juk gegoh marga dan bahasa. Kidang, kantu se menangni jak suku lain ya nekham tantu legowo nekham dengan lapang dada serta mendukung calon terpilih. Kidang, kik nyak se lebih tiutamako nekham duluko mileh secakha tradisional.”

Dalam membentuk perilaku pemilih, pemangku adat memiliki 50% untuk mempengaruhi. Pemangku adat kan sudah otomatis direkomendasikan oleh pihak kandidat maupun timsesnya. Artinya pemangku adat juga mempengaruhi sikap politik masyarakat nya. Kalo saya pribadi memilih seorang

pemimpin itu karena ada rasa kekerabatan seperti adanya kesamaan suku dan bahasa. Namun, kalo pemenangnya adalah dari suku lain ya kita harus legowo dan menerima dengan lapang dada serta mendukung calon yang terpilih. Namun bagi saya yang lebih utama kita dahulukan memilih secara tradisional.⁸

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan dari responden diatas, memberikan informasi bahwa pada proses pembentukan budaya politik masyarakat OKU Selatan, aspek adat (tradisi) maupun pemimpin yang memiliki karisma memiliki pengaruh dalam proses pembentukan budaya politik masyarakat di OKU Selatan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada dalam tradisi masih berlaku bagi masyarakat. Tidak hanya ditaati pada aturan adat, tokoh masyarakat yang memiliki karisma dan tokoh adat (tradisi) ditaati juga dalam pilihan politik. Meskipun sebagian masyarakat telah berpikir modern, namun aspek tradisi sulit untuk dihilangkan.

Dinamika budaya politik masyarakat OKU Selatan memiliki implikasi politik yang menyebabkan kecendrungan-kecendrungan tertentu dalam pembuatan keputusan politik, kecendrungan tersebut berupa kepentingan politik (kelompok) atau kepentingan sosial (umum). Fenomena ini juga memberikan gerakan pada adat (budaya) masyarakat OKU Selatan untuk ikut andil dalam pengawasan terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

⁸*Op.cit*, Wawancara dengan Erwin Shohari.

Dalam hal ini, budaya politik masyarakat OKU Selatan dalam mengawasi dan mengamati politik khususnya dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah OKU Selatan, budaya politik subyek terlihat pada ungkapan pada salah satu masyarakat OKU Selatan. Berikut adalah informasi yang peneliti dapatkan saat melaksanakan wawancara dengan salah satu tokoh adat suku haji :

“soal pembangunan di OKU Selatan ini sebenarnya pesat, cuma dibeberapa tempat cak desa masih tetinggal, ini bukan pulo salah pemerintah pucuk, tapi kades ini yang kurang tau apo kendak masyarakat desanyo. Pembangunan lah dak merata, laju kami cak males milih kepala desa, hidup kami dibantu atau idak tetep cak inilah, kepala desa dak pulo perhatian.”

“Perihal pembangunan di Kabupaten OKU Selatan sebenarnya sangat pesat, namun dibeberapa desa masih ada yang tertinggal, ini bukan salah dari pemerintah atas, namun pemimpin politik di desa (Kepala Desa) kurang memperhatikan akan kebutuhan masyarakat desa nya. Dengan kurangnya pemerataan pembangunan ini, menimbulkan rasa tidak percaya kami pada kepala desa. Ada atau tidaknya kepala desa, tidak menimbulkan pengaruh yang positif terhadap pembangunan di desa”⁹

Berdasarkan pernyataan responden diatas, memberikan informasi bahwa budaya politik subyek juga ditimbulkan dengan adanya kepemimpinan politik khususnya didesa tidak paham akan kebutuhan masyarakat desa nya sendiri. Implikasi dari adanya budaya subyek masyarakat OKU Selatan ini,

⁹ Wawancara dengan Ruslan Arifin, Tokoh Adat Suku Haji Kabupaten OKU Selatan. Wawancara pada tanggal 21 September 2019.

melemahnya kepercayaan mereka pada pemerintah desa dan mereka tidak bangga dengan sistem politik yang mereka gunakan.

Budaya politik masyarakat OKU Selatan didalam sistem politik sangatlah penting. Secara kultur (tradisi) budaya politik masyarakat OKU Selatan akan mempercayai kepemimpinan politik, namun budaya politik masyarakat dapat memainkan peran dalam kehidupan politik. Kehadiran budaya politik masyarakat OKU selatan merupakan penentu utama bagi kinerja kepemimpinan politik. Dengan adanya budaya politik masyarakat OKU Selatan, sistem politik yang ada mendorong budaya politik masyarakat OKU Selatan kedalam pola nilai yang lebih berorientasi sosial, namun juga memungkinkan budaya politik masyarakat OKU Selatan untuk menggapai tujuan kolektif dengan cara yang lebih efektif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur budaya politik subyek itu ada, disatu pihak karena interaksi aktif dari budaya masyarakat OKU Selatan yang mengalami internalisasi, dan terlibat secara aktif dalam menjalankan fungsi sebagaimana budaya politik masyarakat OKU Selatan itu sendiri. di pihak lain juga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan politik di OKU Selatan mengalami tekanan yang lebih besar dari budaya politik yang ada. Oleh sebab itu, aspek adat (kultur) yang ada di Kabupaten OKU Selatan dapat berupaya memaksa pemimpin politik untuk bereaksi secara lebih responsive

terhadap tuntutan dan masukan dari budaya politik yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

Berikut informasi yang peneliti dapatkan pada saat melaksanakan wawancara dengan salah satu masyarakat OKU Selatan :

“Tahun 2019-2020 ji kan tahun peralihan, sekam seunyin ni pemangku adat adu berkomunikasi dan adu sepakat ngayunko Popo Ali Martopo no maju luwot dan sekam aga mileh ia dengan senang hati. Kakhna proram-programni se tibangun pemekhintah lawan pemangku adat ji makung tikhaduko antak khua periode. Cuba kantu calon se bakheh se menang nekham makung pandai api programni. Nyak lain kah aga mendahului Tuhan, mak pandai kanah se aga ngelawan Bapak Popo Ali Martopo, pesaing ni pasti kalah. Lagipula janji politik Popo Ali Martopo wat se makung ti alahko, mungki kakhna keterbatasan ni anggaran no.”

“Apalagi tahun 2019-2020 ini adalah tahun peralihan, kami kelima pemangku adat sudah berkomunikasi dan sepakat untuk menyarankan Popo Ali Martopo maju lagi, dan kami akan memilih dia dengan senang hati. Karena program-program yang telah dibangun pemerintah dan pemangku adat ini harus dituntaskan sampai dua periode. Coba kalau calon lain yang menang kan kita belum tau programnya. saya bukan mendahului Tuhan, sulit nanti yang akan mengalahkan Bapak Popo Ali Martopo, lawan nya pasti kalah. Lagipula janji politik Popo Ali Martopo ada yang masih belum terlaksana, mungkin karena keterbatasan anggaran.”¹⁰

¹⁰*Op.cit*, wawancara dengan Ahmad Buchori Pemangku Adat Suku Ranau.

Dari pernyataan responden diatas, memberikan informasi bahwa adanya basis dukungan kolektif budaya politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan, berimplikasi politik bahwa adanya tuntutan-tuntutan dari budaya yang memaksa kepemimpinan untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari budaya masyarakat OKU Selatan. Kecakapan budaya politik yang ada mengekspresikan perasaan budaya politik masyarakat OKU Selatan memiliki kekuatan dalam kaitannya dengan sistem politik.

3. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang kurang demokratis. Masyarakatnya tidak terlalu peduli dengan identitasnya sebagai warga negara. Mereka tidak bangga terhadap sistem politik negara mereka dan tidak mengharapkan apapun. Mereka tidak menaruh perhatian sedikitpun pada perkembangan politik, memiliki sedikit pengetahuan tentang politik dan tidak membicarakan politik. Budaya politik seperti ini merupakan budaya politik paling rendah.

Budaya politik masyarakat OKU Selatan merupakan salah satu bentuknya budaya parokial, hal ini karena sistem politik itu merupakan sistem interaksi yang ditemukan pada semua masyarakat yang independen yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi (keduanya secara interbal dan

berhadapan dengan masyarakat lainnya), dengan cara bekerja, ancaman kerja dan pemaksaan fisik yang dilegitimasi.¹¹

Dalam hal ini budaya politik masyarakat OKU Selatan ada yang berbentuk parokial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penjelasan dari salah satu tokoh adat suku haji sebagai berikut :

“Saya telah mengetahui sejak awal berdirinya Kabupaten OKU Selatan ini selalu dipimpin oleh Suku Daya. Namun, tidak menutup kemungkinan praktik-praktik politik kesukuan itu ada. Pembangunan di OKU Selatan ini pesat, namun tidak dengan daerah tempat tinggal kami. Jarak daerah kami dekat dengan pemerintah daerah, namun tidak terlihat begitu jelas pembangunannya. Tidak ada kabar pembangunan yang sampai ketelinga saya, jadi saya tidak menaruh harapan apapun terhadap pemerintah sekarang”.¹²

Berdasarkan penjelasan responden diatas, memberikan informasi bahwa tidak selamanya masyarakat OKU Selatan bangga atas sistem politik yang digunakan kalau tidak adanya pemerataan pembangunan pada daerah tertentu. Pro dan kontra terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan berdasarkan persepsi budaya yang ada di Kabupaten OKU Selatan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut memicu nilai-nilai umum yang mendasar sebagai preferensi budaya terhadap kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan terkadang tidak berbanding lurus dengan budaya politik masyarakat dan dengan sistem politik yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

¹¹*Op.cit*, Tareh Rasyid, h.,41.

¹² Wawancara dengan Ahmad Hasran (*Raden Intan*), Tokoh Adat Suku Haji Kabupaten OKU Selatan. Wawancara pada tanggal 23 September 2019.

Dinamika budaya politik yang terjadi dalam interaksi sosial pada masyarakat OKU Selatan berimplikasi politik pada terlegitimasi atau tidaknya keberadaan pemimpin politik. Karena legitimasi politik juga merupakan suatu bentuk dukungan dari budaya politik masyarakat OKU Selatan terhadap kepemimpinan politik yang ada. Legitimasi tersebut dapat berbentuk pada perilaku kepemimpinan politik itu sendiri maupun terhadap kepemimpinan politik itu sendiri.

Pada aspek kepercayaan budaya politik masyarakat OKU Selatan terhadap perilaku kepemimpinan politik bisa berubah-ubah, karena terfokus pada kinerja pada individu pemimpin politik itu sendiri. Sedangkan kepercayaan politik selanjutnya mengacu pada institusi dan sistem politik yang ada di OKU Selatan. Disini asumsinya adalah bahwa kepercayaan terhadap sistem politik dan institusi yang ada sbegitu penting bagi stabilitas sistem itu sendiri. bahkan lebih dari itu jika adat (budaya politik) masyarakat OKU Selatan tidak setuju dengan kebijakan yang sedang dijalankan mereka dapat mengekspresikan dengan berupa kritik dan tuntutan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, budaya politik masyarakat Kabupaten OKU Selatan memiliki perbedaan pandangan budaya terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan. Namun, hal yang lebih dominan terpusat pada budaya politik partisipan. Hal ini dikarenakan adanya tingkat militan budaya masyarakat OKU Selatan dalam menentukan

pilihannya terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan. Namun yang lebih jelas budaya politik masyarakat OKU Selatan merupakan budaya politik yang terbentuk karena adanya pengaruh dari nilai-nilai yang digunakan dalam masyarakat tersebut.

B. Legitimasi Budaya Pada Masyarakat OKU Selatan

Membahas tentang konteks persaingan legitimasi, untuk meyakinkan budaya masyarakat yang multikultur, maka otoritas dalam kaitannya dengan legitimasi sangatlah penting, karena tanpa adanya legitimasi dari masyarakat, kedudukan atau jabatan seseorang pemimpin politik akan bertahan lama. Legitimasi politik merupakan hal yang mutlak dan harus dimiliki oleh setiap kepemimpinan politik dalam upaya menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.

Seorang pemimpin politik dalam menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka mengambil simpati dari budaya yang multikultur diharuskan untuk menjalankan kekuasaan dan wewenangnya (otoritas) semaksimal mungkin, ini dikarenakan adanya hubungan erat antara pemberi legitimasi (masyarakat) dan yang terlegitimasi (pemimpin politik). Lebih dari itu, keberadaan seorang pemimpin politik dengan adanya kekuatan legitimasi yang ia miliki dari masyarakat, maka akan berjalan baik pula kepemimpinan politiknya. Hal inilah yang menjadikan legitimasi sangat penting dalam menjalankan kekuasaan seorang kepemimpinan politik.

Dalam memahami legitimasi telah disediakan oleh *Max Weber*, yang mengkategorikan “sistem dominasi” tertentu dan untuk mengidentifikasi dalam setiap kasus dasar dimana legitimasi itu didirikan. Legitimasi itu sendiri menurut *Max Weber*, yaitu¹³ :

“people may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality—specifically the rationality of the rule of law”.

“orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi), karena mereka memiliki kepercayaan kepada penguasa (karisma), atau karena mereka percaya pada legalitas khususnya rasionalitas aturan hukum”.

Dalam menggambarkan legitimasi budaya terhadap kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan, peneliti menggunakan tiga indikator legitimasi politik menurut *Max Weber* yaitu Legitimasi Tradisional, Legitimasi Karismatik dan Legitimasi Legal – Rasional sebagai berikut :

1. Otoritas Tradisional

Max Weber menjelaskan legitimasi politik didasarkan pada kebiasaan lama dan terbentuk dari tradisi. Akibatnya, otoritas tradisional dianggap sebagai yang sah karena “selalu ada”. Otoritas tradisional ditemukan diantara

¹³*Op.cit*, Ely Nor Ekawati. h.,60.

suku-suku atau kelompok-kelompok kecil yang didominasi yang terkait erat dalam sistem keturunan kekuasaan dan hak istimewa.¹⁴

Pada aspek legitimasi budaya terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan menunjukkan adanya dukungan dari masyarakat khususnya adat (budaya) yang ada di OKU Selatan. Tingkat dukungan militan yang diberikan kepada kepemimpinan politik berupa asumsi, persepsi budaya dan sikap politik yang ditujukan terhadap kepemimpinan politik yang ada.

Dalam hal ini, kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan menjalankan wewenangnya dengan memperhatikan aspek budaya (dalam hal ini suku) yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Dimana aspek suku tidak bisa dilupakan dalam pengaruhnya untuk keterpilihan seorang pemimpin politik di OKU Selatan. Hal demikian juga tergambar dari kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan dengan tujuan mendapatkan perhatian dari budaya yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

Berikut ini adalah informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat suku ranau :

“Nyak diwik mileh pemimpin no karena wat khasa kekerabatan juk gegoh marga khik budaya. Kidang, kantu se menangni jak suku lain ya nekham nekhima tantu legowo nekhima dengan lapang dada serta mendukung calon se terpilih. Juk khenodo, kidang nyakku se tilebih utamako nekham uyunko pai se jak suku nekam diwik”.

“Kalau saya sendiri memilih pemimpin itu karena ada rasa kekerabatan, seperti sama marga dan budaya. Tapi, kalau yang

¹⁴*Op.cit.* Andrey Heywood, h.,80.

menang dari suku lain kita harus terima dan legowo, menerima dengan lapang dada serta mendukung calon yang terpilih. Seperti itulah, kalau saya sendiri yang lebih diutamakan kita dahulukan dari suku kita sendiri”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan salah satu responden diatas, memberikan informasi bahwa, adanya legitimasi secara tradisional yang diberikan masyarakat dalam memilih seorang pemimpin. Dimana, tradisi juga memegang peranan penting dalam menentukan pilihan budaya dan juga berdampak pada legitimasi budaya masyarakat terhadap kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan. Jadi pengaruh aspek budaya atau suku tidak bisa dihilangkan dalam menentukan sebuah pilihan politik.

Dengan adanya kekuatan legitimasi, kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan dapat menarik simpati budaya yang ada di Kabupaten OKU Selatan itu sendiri. hal ini sejalan dengan penjelasan tentang kepemimpinan politik di OKU Selatan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di bawah ini sebuah pernyataan dari tokoh adat suku semende tentang kepemimpinan politik di OKU Selatan :

”Kepemimpinan politik di OKU Selatan ini sangat baik, dari awal hingga saat ini, mereka sangat memperhatikan adat. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat sangat diperdulikan, apalagi adat. Kalau rasa cemburu sosial saya tidak ada, jika pemimpin dari suku lain lebih pantas, mengapa

¹⁵*Op.cit*, Erwin Shohari, Tokoh Adat Suku Ranau.

harus dari suku kita. Jadi, bagi saya aspek suku itu tidak terlalu berpengaruh dalam kepemimpinan politik”.¹⁶

Berdasarkan keterangan dari responden diatas, memberikan informasi bahwa, kepemimpinan politik di OKU Selatan sangat baik dan peduli terhadap masyarakat, apalagi adat yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Dalam memilih seorang pemimpin tidak berdasarkan latar belakang suku, namun lebih dari itu soal pantas atau tidaknya seorang menjadi seroang pemimpin. Sejati nya, pemimpin itu merupakan panutan, segala tindak tanduk nya selalu diperhatikan dan diawasi oleh masyarakat khususnya adat yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

Legitimasi tradisional yang ada dan melekat pada adat dan budaya masyarakat OKU Selatan dengan mempertahankan nilai-nilai kultur yang berimplikasi politik pada perilaku politik dan pandangan budaya (adat) terhadap kinerja kepemimpinan politik yang ada. Basis dukungan tradisi memiliki pengaruh yang cukup besar, aspek adat (kultur) dari budaya politik masyarakat OKU Selatan juga menjadi penentu terlegitimasi atau tidak nya keberadaan kepemimpinan politik yang ada.

¹⁶ Wawancara dengan Syahrul Junaidi, Tokoh Adat Semende dan Kepala Desa Kota Dalam, Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Wawancara tanggal 25 September 2019.

2. Otoritas Karismatik

Menurut *Max Weber* otoritas karismatik merupakan bentuk otoritas yang didasarkan pada kekuatan kepribadian seorang individu yaitu pada karisma atau kesaktiannya. Otoritas karismatik ini juga beroperasi sepenuhnya melalui kapasitas dari pemimpin untuk membuat daya tarik langsung dan pribadi untuk pengikut sebagai semacam pahlawan. Namun otoritas karismatik bukan hanya hadiah atau kecenderungan alami sistem aturan pribadi yang selalu didukung oleh kultus kepribadian yang bertujuan untuk memproduksi karisma.¹⁷

Namun demikian, ketika legitimasi dibangun sebagian besar atau seluruhnya, melalui kekuatan kepribadian seorang pemimpin, biasanya ada dua konsekuensi yaitu, *Pertama*, wewenang sebagai karismatik tidak didasarkan pada aturan atau prosedur formal. Dalam hal ini, salah satu tokoh adat sekaligus pegawai memberikan keterangan tentang adanya legitimasi karismatik yang melekat pada kepemimpinan politik di OKU Selatan. Berikut adalah informasi yang peneliti dapatkan saat melaksanakan wawancara dengan tokoh adat suku ranau sekaligus pegawai di Kabupaten OKU Selatan :

“Kepemimpinan Politik di OKU Selatan no sosok se wat karisma khik perhatian nihan lawan nekham serta ia sangat tegas khik merakyat khik juga ia khisok khatong kik wat acara di masyarakat kantu tiundang. Kik ia mek pandai khatong, ia ngwakilko lawan binini kemek lawan asistenni. Inji artini kepemimpinan politik di OKU Selatan ji sangat loyalitas lawan masyarakatni”.

¹⁷*Op.cit*, Andrey Heywood, h.,81.

“Kepemimpinan politik di OKU Selatan adalah sosok yang berkarisma dan sangat memperhatikan masyarakat serta beliau sangat tegas dan merakyat dan juga tak jarang beliau menghadiri acara hajatan di masyarakat jika di undang. Jika beliau berhalangan hadir, beliau mewakilkan pada istri ataupun asistennya. Artinya kepemimpinan politik di OKU Selatan saat ini sangat loyalitas terhadap masyarakatnya”.¹⁸

Berdasarkan penjelasan dari responden diatas, memberikan informasi bahwa kepemimpinan politik di OKU selatan memiliki karisma dalam kepemimpinannya. Dengan adanya legitimasi karismatik yang melekat pada kepemimpinan politik di OKU Selatan yang dinyatakan oleh masyarakat khususnya adat di Kabupaten OKU Selatan, menjadikan kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan dalam wewenangnya terdapat legitimasi dari masyarakat dan adat yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

Kedua, otoritas terkait dengan individu tertentu, merupakan sulit untuk mempertahankan sistem pemerintahan pribadi untuk hidup lebih lama dari sosok pendirinya. Berikut informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat suku semende sebagai berikut :

“Kepemimpinan politik di OKU Selatan ini sangat baik, seorang Popo Ali Martopo sendiri sangat memiliki karisma, beliau ini membaaur dengan masyarakat, setiap beliau kunjungan ke masyarakat sikap nya sangat ramah sekali. Bahkan menurut prediksi saya, kalau tahun 2020 mendatang

¹⁸*Op.cit*, Wawancara dengan Erwin Shohari.

ada keluarga dari “SAMUDERA”¹⁹ yang mencalonkan diri, saya yakin dia akan menang. Selain mereka memiliki karir politik yang baik, keluarga “SAMUDERA” juga terkenal kaya dan bagus dalam hal kepemimpinannya”.²⁰

Berdasarkan keterangan dari respondendiatas, memberikan informasi bahwa meskipun mayoritas masyarakat OKU Selatan merupakan Suku Daya, namun dalam hal kepemimpinan politik mereka juga mempunyai skill dalam memimpin. Sudah barang tentu pemimpin yang memiliki skill dan mumpuni dalam hal memimpin ialah pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat OKU Selatan. Inilah salah satu alasan mengapa seorang pemimpin politik tidak hanya populer, namun memiliki skill dalam memimpin.

Sebagaimana yang telah kita ketahui figur seorang pemimpin dan kepemimpinannya memiliki pengaruh positif untuk menggalang legitimasi dari masyarakat terutama budaya. Hal yang demikian tercermin pula pada sosok Popo Ali Martopo sebagai Bupati OKU Selatan periode 2015-2020. Berkaitan dengan hal ini salah satu koordinator adat suku kisas memberikan keterangan sebagai berikut :

¹⁹ Keluarga besar (keturunan) Bupati OKU Selatan sebelumnya (Suku Daya).*Sumber* : Wawancara dengan Tokoh Adat Semende, Syahrul Junaidi. Wawancara pada tanggal 25 September 2019.

²⁰*Ibid*, Wawancara dengan Syahrul Junaidi.

“Meskipun Popo Ali Martopo ni Jeme Daye, namun die punya care lok bapang, padahal masih mude. Akhir bulan juli 2019 lalu, kami (suku kisam) anugerahi die gelar, “Jenang Jurai”²¹. Jadi, amun Popo Ali Martopo ni ke kisam, kate jeme kisam bukan cume Bupati saje, inilah jenang jurai kami. Ngape kami enjuk die gelar jenang jurai, karne sifat lok care die inilah yang jeme kisam kehendaki”.

“Meskipun Popo Ali ini orang Daya, namun dia punya cara seperti seorang bapak (orang tua), padahal dia masih muda. Akhir bulan juli 2019 lalu kami (suku kisam) menganugerahi dia gelar dengan sebutan “Jenang Jurai”. Jadi, kalau Popo Ali Martopo ke kisam, kata orang kisam bukan sekedar bupati yang datang, tapi lebih dari itu jenang jurai mereka yang datang. Kenapa kami anugerahi dia gelar ini, karena sifat dan cara kepemimpinan beliau inilah yang dikehendaki orang Suku Kisam”²²

Berdasarkan penjelasan dari salah satu responden diatas, memberikan informasi bahwa adanya legitimasi karismatik yang diberikan masyarakat adat kisam kepada kepemimpinan politik di OKU Selatan, karena sifat dan cara kepemimpinan politik yang perduli dan perhatian kepada adat yang dikehendaki oleh masyarakat OKU Selatan khususnya masyarakat Suku Kisam.

²¹*Jenang Jurai* adalah semua anak laki-laki yang urutannya kedua, turunan kedua satu keluarga yaitu semua kemenakan laki-laki (dengan pangkat adalah *meraje*) dari *Payung Jurai*(*meraje tinggi*) adalah semua anak laki-laki yang urutannya teratas. Tugas *Payung Jurai* ini adalah berkewajiban melindungi, mengasuh dan mengatur jurai. Sedangkan fungsi *Jenang Jurai* adalah berkewajiban menjenangi, mengatur keluarga (terutama dalam rumah tangga tunggu tubing), segala sesuatu jika ada yang bersengketa, maka *Jenang Jurai* akan melapor (mengatur). Sumber : Adat Istiadat Masyarakat Suku Asli Kabupaten OKU Selatan, (2012).

²² Wawancara dengan Haji Pawiman, *Koordinator Adat Suku Kisam*, Kabupaten OKU Selatan, Wawancara pada tanggal 23 September 2019.

Lebih dari itu, figur seorang pemimpin dapat mempengaruhi opini publik dalam hal ini masyarakat OKU Selatan khususnya pada adat yang ada di Kabupaten OKU Selatan, sehingga dapat menimbulkan tindakan kolektif dari masyarakat bahkan adat yang dapat menguntungkan seorang pemimpin yang memiliki legitimasi dari masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh tokoh agama sekaligus tokoh adat suku ranau tentang adanya legitimasi karismatik pada kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Berikut informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama sekaligus tokoh adat suku ranau :

“Sepa gawoh pemimpinni, jak suku dipa gawoh nekham harus tetap saling menghargai. Juk ni kepemimpinan politik (Bupati) OKU Selatan takno, ia wat karisma khik religious. Ia juga khisok khatong ti acakha Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan pengajian akbar. Jak kepemimpinan politik takno ji, adu lamon kemajuan khik perkembangan. Pembangunan adu pandai tikhasako khik tinikmati uleh nekham. Nyak adu lega, khik puas serta senang atas kepemimpinan politik di OKU Selatan ji. Balak kemungkinan, a tahun 2020 kanah ia menang luwot, kakhna gawini helau khik nyata, juga adu ngejukko dampak positif untuk masyarakat”.

“Siapa pun pemimpinnya, dari suku manapun kita harus tetap saling menghargai. Seperti kepemimpinan politik (Bupati) di OKU Selatan saat ini, yang memiliki karisma serta religious. Beliau juga sering datang di acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan pengajian akbar. Sejak kepemimpinan politik di OKU Selatan saat ini sudah banyak kemajuan dan perkembangan. Pembangunan pun sudah bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Saya sudah merasa lega dan merasa puas serta merasa senang atas kepemimpinan politik di OKU Selatan ini. Kemungkinan besar, pada tahun 2020 mendatang Popo Ali Martopo akan terpilih kembali menjadi

Kepala Daerah di Kabupaten OKU Selatan ini, karena kinerjanya sangat baik dan nyata, juga telah memberikan dampak positif untuk mensejahterakan masyarakat”²³

Berdasarkan informasi dari responden diatas, memberikan informasi bahwa kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan dalam menjalankan wewenangnya sangat memikirkan pada aspek adat, ini dibenarkan oleh salah satu tokoh agama diatas bahwa kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan dalam pembangunan sudah nyata dan dapat dinikmati oleh masyarakat OKU Selatan.

3. Otoritas Legal-Rasional

Menurut *Max Weber* otoritas legal-rasional merupakan bentuk yang berdasarkan kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Dalam otoritas ini *Weber* menyatakan, bentuk khas paling modern adalah Negara. Kekuatan seorang pemimpin ditentukan dalam analisis akhir oleh aturan konstitusi formal yang membatasi untuk sebuah tindakan politik.²⁴ *Beetham* menyatakan dalam bukunya (*Beetham D, the legitimation of power*)²⁵ kekuasaan hanya dapat dikatakan sah jika tiga kondisi terpenuhi. *Pertama*, kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan aturan. Apakah ini diwujudkan dalam kode hukum formal atau dalam konvensi informal.

²³*Op.cit*, Wawancara Hasim Ihsan.

²⁴*Op.cit*, Andrey Heywood, h., 82.

²⁵ *Ibid*,h., 83.

Pada aspek legitimasi legal-rasional, aturan adat tetap diakui bahkan dapat bertahan diatas nilai-nilai yang ada. Namun aspek hukum juga menjadi penentu utama terlegitimasi atau tidaknya keberadaan kepemimpinan politik yang ada. Dalam hal ini legitimasi legal-rasional yang diberikan masyarakat khususnya adat (kultur) terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan diukur dari penerimaan budaya dengan sistem politik yang ada. Hal ini disebabkan karena aturan hukum yang ada harus tetap dibenarkan dan diakui secara bersama.

Berikut adalah informasi yang peneliti dapatkan pada saat melaksanakan wawancara dengan pemangku adat suku ranau Kabupaten OKU Selatan :

“Kepemimpinan politik di OKU Selatan ji helau nihan, hubungan pemekhintah khik masyarakat khususni pemangku adat terjalin helau becong. Di dipa pemekhintah mendukung program api setiusulko nekham, sebaliknya api setiprogramko pemekhintah didukung ulehni pemangku adat. Sekam jak pemangku adat ji mekhasa kagum dan mengapresiasi lawan kepemimpinan politik di OKU Selatan takno, tian aga nekham api cawa jak bah, tekhutamani pemangku adat. Pemekhintah takno juga peduli nihan jama adat dan tiperhatiko nihan. Intini, kepemimpinan politik di OKU Selatan jak awal ampai takno berjasa nihan”.

“Kepemimpinan politik di OKU Selatan ini sangat baik, hubungan pemerintah dan masyarakat khususnya pemangku adat terjalin baik sekali. Di mana pemerintah mendukung program apa yang diusulkan oleh pemangku adat. Kami dari pemangku adat merasa kagum dan mengapresiasi dengan kepemimpinan politik di OKU Selatan sekarang, mereka mau menerima masukan dari masyarakat terutama dari pemangku

adat. Pemerintah sekarang juga peduli dengan adat dan sangat diperhatikan. Pada intinya, kepemimpinan politik di OKU Selatan dari awal hingga saat ini sangat berjasa”.²⁶

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan responden diatas, memberikan informasi bahwa memang benar adanya kepemimpinan politik di OKU Selatan sangat memperhatikan dan sangat peduli dengan adat yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Implikasinya adalah terciptanya kekuatan legitimasi dan dukungan dari adat serta tindakan kolektif masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan. Lebih dari itu, pemimpin politik di OKU Selatan dalam menjalankan kekuasaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan aturan yang diwujudkan dengan kode hukum formal. Aturan itupun dibenarkan dan disetujui oleh pemerintah dan juga masyarakat OKU Selatan.

Kedua, aturan itu harus dibenarkan dalam hal keyakinan bersama dari pemerintah dan yang diperintah. Dengan adanya kekuatan legitimasi yang dimiliki oleh kepemimpinan politik di OKU Selatan, maka dalam legitimasi legal-rasional, masyarakat OKU Selatan telah berpikir secara modern dan memilih pemimpin itu berdasarkan realita yang mereka alami.

Berikut informasi yang peneliti dapatkan pada saat melaksanakan wawancara dengan pemangku adat suku daya sebagai berikut :

²⁶*Op.cit*, Wawancara dengan Ahmad Buchori (*Sultan Takdir Sah I*).

“Kepemimpinan politik di OKU Selatan ini sangat baik dan perhatian terhadap adat. Apapun yang menjadi keluhan masyarakat dan adat selalu di dengar oleh kepemimpinan politik di OKU Selatan. Jadi kami sebagai pemangku adat senang dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, karena adat ini sangat-sangat dipikirkan. Jika kami pemangku adat ke kantor Bupati, beliau selalu dengan senang hati menerima kami dan menjamu kami dengan baik”.²⁷

Berdasarkan penjelasan dari responden diatas, memberikan informasi bahwa adanya legitimasi legal-rasional yang diberikan masyarakat khususnya adat suku daya terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan. Apapun yang menjadi kebutuhan adat, pemerintah sangat peduli dan perhatian. Hal inilah yang menyebabkan adanya legitimasi secara legal-rasional dari masyarakat khususnya adat OKU Selatan terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Dalam konsep wewenang (otoritas) yang berkaitan dengan konsep legitimasi (keabsahan), merupakan bagian penting dalam sistem politik. Keabsahan itu sendiri merupakan keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang adapada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut untuk dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang telah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sah.

²⁷ Wawancara dengan Cik Wi Alam (*Raden Intan*), Pemangku Adat Suku Daya Kabupaten OKU Selatan. Wawancara pada tanggal 23 September 2019.

Maka dari itu mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa itu dipatuhi. Dalam hubungan ini dikatakan oleh *David Easton*²⁸ bahwa, “*The conviction on the part on the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime*”, (keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu).

Ketiga, legitimasi harus ditunjukkan oleh ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah, yakni adanya pemilu dan kompetisi partai, sistem dimana persetujuan populer dapat dieksekusi dan dasarnya aturan konstitusional yang secara luas mencerminkan bagaimana orang merasa mereka harus diatur.

Dilihat dari sudut penguasa, dapat dipakai ucapan dari *A.M. Lipset*²⁹, yaitu : “*Legitimacy includes the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society*”. (Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada merupakan yang paling wajar untuk masyarakat itu).

²⁸Miriam Budiardjo, (2008). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), Edisi Revisi, h.,65.

²⁹*Ibid*, h.,65.

Dalam hal ini kepemimpinan politik OKU Selatan dalam membenrtuk budaya politik dan legitimasinya pada masyarakat OKU Selatan dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pemangku adat suku semende Kabupaten OKU Selatan sebagai berikut :

“Kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan sangat baik. Pembangunan infrastruktur sangat merata dan sangat perhatian terhadap adat. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan juga menganjurkan kepada pemangku adat untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di Kabupaten OKU Selatan ini. Meskipun pro-kontra itu pasti ada, kami Suku Semende termasuk memuji kepemimpinan politik di OKU Selatan, karena tidak ada anak tirinya dan semua adat diperlakukan sama. Beliau ini masih muda dan cara kepemimpinannya sangat baik. Pemimpin seperti inilah yang masyarakat OKU Selatan kehendaki”.³⁰

Berdasarkan penjelasan responden diatas, memberikan informasi bahwa kepemimpinan politik di OKU Selatan memiliki legitimasi legal-rasional. Dimana masyarakat dan adat yang ada di Kabupaten OKU Selatan secara hukum dan aturan mengakui kepemimpinan politik di OKU Selatan yang sangat tegas, bahkan lebih dari itu masyarakat dan adat yang ada Kabupaten OKU Selatan memuji kepemimpinan politik di OKU Selatan karena cara kepemimpinannya yang baik.

³⁰ Wawancara dengan Aridi, Pemangku Adat Suku Semende Kabupaten OKU Selatan. Wawancara pada Tanggal 25 September 2019.

Berdasarkan data yang telah dianalisis diatas, menunjukkan bahwa otoritas kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan memiliki legitimasi dari masyarakat OKU Selatan terutama dari adat (dalam hal ini suku) yang ada di Kabupaten OKU Selatan, baik itu pemberian legitimasi tradisional, legitimasi karismatik dan legitimasi legal-rasional. Meskipun adanya pro dan kontra yang terjadi dalam interaksi sosial dan politik masyarakat OKU Selatan, namun kepemimpinan politik di OKU Selatan dalam legitimasi budaya masyarakat tetap diakui keberadaannya, karena cara dan sifat kepemimpinan politik di OKU Selatan yang sangat memikirkan adat dan budaya yang ada di Kabupaten OKU Selatan itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan relasi otoritas kepemimpinan politik di OKU Selatan dan legitimasi budaya yang ada di OKU Selatan dapat berjalan dengan baik.